



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN  
( RTP )  
KECAMATAN WANGON  
TAHUN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**KECAMATAN WANGON**

Jalan Raya Utara Nomor 58 Wangon Kode Pos 53176

Telephone (0281) 513277 Faximile (0281) 513277

Email: [wangonkecbanyumaskab@gmail.com](mailto:wangonkecbanyumaskab@gmail.com) Website: [wangonkec.banyumaskab.go.id](http://wangonkec.banyumaskab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita Panjatkan kehadiran Alloh SWT atas rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian ( RTP ) Kecamatan Wangon Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *Goodgovernance* sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan system pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/daerah.

Mengingat pentingnya system pengendalian intern, sesuai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan SPIP ini, dokumen penilaian risiko yang kita susun ini dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini, dengan harapan ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

Wangon Desember 2022



NIP. 19730603 199403 1 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	
Daftar Isi .....	
Daftar Lampiran .....	
I GAMBARAN UMUM.....	1
A. PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Dasar Hukum .....	4
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Manfaat .....	5
5. Ruang Lingkup .....	6
II SEKILAS TENTANG SPIP .....	7
1. Pengertian SPIP .....	7
2. Tujuan SPIP .....	7
3. Unsur-unsur SPIP .....	7
III LINGKUNGAN PENGENDALIAN.....	11
1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan.....	11
2. Kondisi Lingkungan Pengendalian.....	11
3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.....	13
IV PENGENDALIAN.....	15
1. Pernyataan Tujuan .....	15
2. Risiko-Risiko .....	15
3. Pengendalian Terpasang.....	18
4. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan .....	18
V INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	20
VI PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN .....	21
1. Pemantauan Berkelanjutan .....	21
2. Evaluasi Terpisah .....	21
3. Pelaksanaan Tindak Lanjut .....	21
4. Pemantauan atas pelaksanaan RTP.....	22
VII PENUTUP .....	23
Lampiran - Lampiran	

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1

Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian

### Lampiran 2

Daftar Risiko Prioritas Teridentifikasi Kecamatan Lumbir

### Lampiran 3

Formulir Analisis Resiko Kecamatan Wangon

### Lampiran 4

Rencana Tindak Perbaikan Kegiatan Pengendalian Kecamatan Wangon

### Lampiran 5

Bagan Peta Risiko Kecamatan Lumbir



### **1.1. PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menyatakan bahwa diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian kegiatan penyelenggaraan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan dalam pengendalian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal yang diselenggarakan secara menyeluruh bagi instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

## **1.2. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan penerapan pengendalian intern, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perlu disusun Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP) yang digunakan sebagai acuan bagi para penyelenggara tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan, penyelenggaraan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Tujuan Pembangunan daerah yang menjadi ampunan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas seperti yang tertuang dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Rencana Tindak Pengendalian ini diprioritaskan untuk pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.

## **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RTP strategis Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintahn Daerah;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian

Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- 6) Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Kabupaten Banyumas;
- 7) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas No, 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
- 8) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
- 9) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di pad Perangkat Daerah

#### **1.4. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian untuk memberikan acuan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas dalam mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah penyimpangan dan mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi

#### **1.5. MANFAAT**

Manfaat penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian di lingkungan di Kecamatan Wangon kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar penyelenggaraan SPIP secara menyeluruh di lingkungan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;
- 2) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.



## 1.6 RUANG LINGKUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini Fokus pada identifikasi risiko dan rencana tindak pengendalian atas risiko strategis dan risiko operasional Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas. Penyusunan RTP Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas berdasarkan pada Rencana Kinerja Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
3. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
4. Pendampingan dan Asistensi (sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah).

Penyusunan RTP Tahun 2022 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Di mana dalam peraturan tersebut telah diatur mengenai program dan kegiatan pada setiap urusan pemerintahan. Berdasarkan Peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

I	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
		1.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	1,	. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
		1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan



		2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
III.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
		1.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
		2.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
		1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
		2.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
		3.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
VI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	1.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

		6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	3.		Penyediaan Jasa PenunjangB Urusan Pemerintahan Daerah
		1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	4.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1..	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	5.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1,	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

### SEKILAS TENTANG SPIP

#### 2.1. PENGERTIAN SPIP

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### 2.2. TUJUAN SPIP

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

#### 2.3. UNSUR-UNSUR SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP di Kecamatan Wango berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan



pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Untuk mencapai kualitas lingkungan pengendalian yang efektif, perlu dikembangkan lingkungan pengendalian dengan :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif;
8. Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait.

b. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko organisasi serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa

tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan pengendalian yang perlu dilaksanakan organisasi ditentukan berdasarkan hasil penilaian risiko dengan mempertimbangkan kecukupan pengendalian existing.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

d. Informasi dan Komunikasi.

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan Keputusan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Pimpinan organisasi dan seluruh jajaran manajemen harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan yang diperoleh melalui proses identifikasi dan distribusi dalam bentuk dan waktu yang tepat agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, Informasi dan Komunikasi yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan penilaian risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

e. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai

dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Audit.

#### **2.4. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (*STATEMENT OF RESPONSIBILITIES*)**

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri / Pimpinan Lembaga/ Gubernur / Bupati / Walikota/ Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, maka dipandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi tujuan/sasaran sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.



## **BAB III**

### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

#### **3.1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperaneftif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **3.2. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

Kondisi Lingkungan Pengendalian Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian dilakukan dengan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas diperoleh gambaran sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Sub. Unsur</b>	<b>Kondisi</b>
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuaidengan Kebutuhan	Memadai

5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Sumber : Aplikasi MRI, 2022

Survey persepsi yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas melibatkan ASN pada Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas sebagai responden. Responden ditetapkan sebanyak 17 (tujuh belas) orang dari Total ASN yaitu 17 (tujuh belas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Struktural dan 8 (delapan) orang pelaksana atau sejumlah 100%. Penetapan jumlah responden untuk memenuhi minimal responden sebanyak 30% telah memenuhi. Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua subunsur memadai. Sedangkan berdasarkan review terhadap dokumen menunjukkan hasil bahwa masih terdapat 2 (dua) sub unsur yang kurang memadai yaitu sub unsur **Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait** dan **Pendelegasian Wewenang Dan Tanggungjawab Yang Tepat**. Adapun kelemahan-kelemahannya dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada sub unsur **Pendelegasian Wewenang Dan Tanggungjawab Yang Tepat**, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, antara lain:
  - Dokumen Perencanaan belum dipublikasikan tepat waktu kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 2) Pada sub unsur **Hubungan Kerja Yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait**, hal-hal yang masih perlu ditingkatkan, antara lain:
  - Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah b. Dokumen Laporan Kinerja belum menginformasikan Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi Perbaikan Kinerja)

### 3.3. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), terdapat kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu:

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung jawab	Waktu Pelaksanaan
1	2	3	4
1.	<b><i>Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah Terkait</i></b>		
a.	Kecamatan Wangon berupaya mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu melalui Website Kecamatan secara berkala	Camat	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2022
2	<b><i>Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Pemerintah Terkait</i></b>		
a	Camat Wangon dan jajarannya melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen perencanaan kinerja dengan : mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tahun-tahun setelahnya secara tepat waktu	Camat	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2022
b	Camat Wangon dan jajarannya melakukan upaya perbaikan implementasi SAKIP pada komponen pengukuran kinerja dengan : Melakukan sosialisasi terkait dengan perencanaan capaian kinerja kepada seluruh pegawai di lingkungan Kecamatan Lumbir	Camat	Triwulan I, II, III, IV Tahun 2022

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada lampiran :

- Form 1A* : *Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*
- Form 1B* : *CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas*
- Form 1C* : *Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas*



## BAB IV PENILAIAN RISIKO

### a. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk pengelolaan risiko perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2022-2026 mengacu pada Visi, Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahap Keempat pada RPJP Kabupaten Banyumas Tahun 2005–2025. Perumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2022 atau RPJMD transisi disusun berdasarkan permasalahan atau isu- isu strategis Kabupaten Banyumas tahun 2022-2026 juga berdasarkan pada analisis terhadap isu-isu strategis dan actual yang Tengah berlangsung, serta menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2022, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025. Dan Tujuan dalam RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2026 diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah;
3. Menangani Kemiskinan dan Pengangguran serta Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
4. Memperkuat Ketahanan Pangan.

Keempat tujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah. Berikut merupakan sasaran strategis Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Tahun 2022-2026:

Konteks	Kegiatan	Indikator
Resiko Strategis	Meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan	Nilai SAKIP Pemerintahan Kecamatan
	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintah Kecamatan	Presentase Capaian Kinerja Pelayanan Pemerintahan Kecamatan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada lampiran :

*Form 2B : Penetapan Konteks Risiko Strategis Kecamatan*

*Wangon*

#### 4.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam tahapan ini, berbagai risiko mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko. Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut:

No	Pernyataan Risiko
<b>A.</b>	<b>Risiko Operasional / Kegiatan OPD</b>
1	Adanya pungli dalam Pemberian layanan Kepada Masyarakat
2	Adanya urusan yang belum tertangani secara Optimal
3	Belum Optimalnya Pembangunan di Wilayah Kecamatan

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran :

*Form 3.b : Identifikasi Risiko Strategis Kecamatan Wangon*

#### 4.3 ANALISIS RISIKO

Tahapan selanjutnya, hasil identifikasi risiko kemudian di analisis menggunakan kriteria penilaian risiko dengan menentukan nilai kemungkinan dan dampak. Rincian hasil analisis risiko selengkapnya dapat dilihat pada lampiran form 4.

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai sedang sampai dengan sangat tinggi. Berikut adalah daftar risiko prioritas dan hasil analisis risiko Kecamatan Wangon.

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko
	Adanya Pungli dalam Pemberian layanan Kepada Masyarakat	RSO.24.53.53	1
	Belum Optimalnya Pembangunan diwilayah Kecamatan	RSO.24.53.53	1,21
	Adanya urusan yang belum tertangani secara optimal	RSO.24.53.53	1,21

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, pemerintah daerah membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dan risiko yang muncul (mitigative), atau keduanya. Rincian risiko prioritas dapat dilihat pada lampiran *Form 5*.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektivitasnya yang ditunjukkan pada lampiran *Form 6* dan *Form 7*. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur Pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku dan jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.



**KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapakegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Kecamatan Wangon telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas;

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Aktivitas pengendalian yang telah dilaksanakan terhadap risiko operasional/kegiatan di antaranya adalah:

1. Evaluasi SPIP;
2. Reviu dan pendampingan penyusunan RTP;
3. Monev dan paparan hasil pengawasan secara rutin;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penyusunan Peta Kompetensi.

Namun demikian, kegiatan pengendalian yang dilaksanakan oleh Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas ini masih belum sempurna dan masih membutuhkan kegiatan-kegiatan lain untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian. Untuk itu pada Tahun 2022 telah direncanakan dalam RTP jenis-jenis pengendalian serta penanggung jawab dan target waktu penyelesaiannya seperti tercantum dalam Lampiran I, *Form 7*.

**INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP).

Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/bimtek diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,
4. Mengadakan rapat-rapat, koordinasi, Konsultasi dan desk

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I *Form 8*.



## BAB VII

### PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 9*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran *Form 10*.

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas merupakan bagian dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan bentuk pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun. Komitmen dari seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang professional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Wangon, Desember 2022



Pembina Tk. I

NIP. 19730603 199403 1 003

**CEE BERDASARKAN DOKUMEN KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas

Tahun Penilaian : 2022

Urusan Pemerintahan : Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Uraian Kekuatan	Klasifikasi
a	b	c	d	e
1	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Nomor : 700/035.PKTP/14/IRBAN2/ST.030/2021 tanggal 3 September 2021	Kecamatan Wangon belum meningkatkan kualitas dan pemertaan evaluasi Kinerja agar memberikan rekomendasi - rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan dan dapat ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Kinerja	Kecamatan Wangon telah menyusun dokumen Renstra dan dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan berupa RKT, RKA, dan Perjanjian Kinerja.	Kepemimpinan yang Kondusif
2	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Nomor : 700/035.PKTP/14/IRBAN2/ST.030/2021 tanggal 3 September 2021	Kecamatan Wangon belum mengaktifkan penyampaian Kinerja secara berkala melalui E-SAKIP	LKE SAKIP tersusun rapi dan dapat diakses di Website : wangonkec.banyumaskab.go.id	Kepemimpinan yang Kondusif
3	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Nomor : 700/035.PKTP/14/IRBAN2/ST.030/2021 tanggal 3 September 2021	Kecamatan Wangon belum memanfaatkan sumber daya yang ada agar capaian kinerja yang telah ditetapkan dan telah diperjanjikan dapat dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dan diperjanjikan	Kecamatan Wangon telah membuat IKU yang dapat digunakan sebagai ukuran kinerja secara formal, adapun penjabaran kinerja telah dilakukan secara berjenjang mulai dari pimpinan selaku PA ke penanggung jawab Program sampai penanggungjawab kegiatan sehingga kinerja organisasi telah dilakukan secara baik sampai jenjang Pelaksana . dan Pengukuran Kinerja individu telah dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi " Simpatik Terintegrasi " sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja Pegawai.	Kepemimpinan yang Kondusif

\*) Klasifikasi permasalahan menguraikan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan uraian kekuatan jika berdasarkan data yang ada merupakan kekuatan



Kolom e diisi dengan klasifikasi kelemahan/kekuatan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

FORMULIR RISIKO  
KECAMATAN WANGON

No	Program/ Kegiatan	Tujuan	Risiko			Penyebab			Dampak			Pengukuran Risiko			Peringkat	Yang Harus Ada	Pencegahan				
			Regi	Uraian	Penilik	Uraian	Sumber	UC	Uraian	Pihak yang Terkena	D	K	SR	Uraian			E/RS/TE	Celah	Yang Masih Dibutuhkan		
1	Fasilitas Identifikasi PGB PBB	Meningkatkan target pendapatan PBB	a.1	Peluang penungut PBB yang kurang aman	Desa	Seringkali data Pungutan PBB dikepal Penungut terlewat dituliskan	Internal	C	Seringkali data Pungutan PBB dikepal Penungut terlewat dituliskan	Wali Pajak dan desa	2,00	5,00	10	Tinggi		Membantu penanaman kepada petani pemungut, pegawai di lingkungan pemerintahan dan masyarakat lain penungutnya pajak siap pemungutan	E				
			a.2	Jadwalk Penambuan PBB yang sering terlupakan dengan kegiatan lain	Instansi	Jadwal Penambuan yang terlupakan dengan kegiatan lain sering membuat penambuan PBB di desa kurang optimal	Internal	C	Jadwalk Penambuan yang terlupakan dengan kegiatan lain sering membuat penambuan PBB di desa kurang optimal	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah		Pada saat ini pemerintah jember belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kewajiban PBB dengan baik	E				
2	Fasilitas Perburuyusan Masyarakat dan Tim Pengabdian Masyarakat Kemiskinan Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan tim pengabdian kemiskinan kecamatan	b.1	Kurangnya SDM di bidang permas sehingga banyak tugas terakumulasi dan tidak maksimal	Kasi Permas	Dana yang tersedia untuk kegiatan permas sangat terbatas dan tidak merata	Internal	C	Sisa Permas hanya 1 tapi banyak tugas yang harus diselesaikan	Kasi Permas	2,00	3,00	6	Moderat		Mengajukan untuk dibantu dengan tenaga ahli dan tenaga sukarelawan sebagai tim pengabdian kemiskinan	KE				
			b.2	Data base kemiskinan yang kurang akurat	Kasi Permas	Data kemiskinan yang tidak terupdate dan tidak akurat	Eksternal	UC	Data kemiskinan yang tidak terupdate dan tidak akurat	Kasi Permas	0,00	0,00	0	Sangat Rendah		Membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan diri dalam mencari peluang usaha	KE				
3	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan APBDdes Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasan APBDdes	c.1	Kurangnya SDM di Kasi Pemerintahan sehingga belum optimalnya Beras APBDdes	Kasi Pemerintahan	Kurangnya staf di Kasi Pemerintahan khususnya yang menguasai aturan terkait APBDdes	Internal	C	Kurangnya staf di Kasi Pemerintahan khususnya yang menguasai aturan terkait APBDdes	Kasi Pemerintahan	1,00	2,00	2	Sangat Rendah		Mengajukan untuk dibantu dengan tenaga ahli dan tenaga sukarelawan sebagai tim pembinaan dan pengawasan APBDdes	KE				
4	Fasilitas penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Terselenggaranya fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kecamatan	d.1	Perbaikan belum lengkap membawa pelayanan sehingga sering menyulitkan pelayanan	Kasi Pelayanan	Perbaikan belum lengkap membawa pelayanan sehingga sering menyulitkan pelayanan	Eksternal	UC	Perbaikan belum lengkap membawa pelayanan sehingga sering menyulitkan pelayanan	Kasi Pelayanan	1,00	2,00	2	Sangat Rendah		Mengajukan penanaman dan perbaikan masyarakat melalui pelatihan dan pembinaan	E				
			d.2	Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan teknis TK	Kasi Pelayanan	Tidak adanya pelatihan untuk pegawai yang masih kurang kompetensi dalam pekerjaan yang berbasis komputer	Internal	C	Tidak adanya pelatihan untuk pegawai yang masih kurang kompetensi dalam pekerjaan yang berbasis komputer	Kasi Pelayanan	0,00	4,00	0	Sangat Rendah		Mengajukan Pegawai untuk mengikuti Bimbel tentang Pelayanan PATEN	E				

5	Facilities Perencanaan dan Pengembangan Desa / Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan teslilitasi pengembangan di tingkat Kecamatan	e 1	Belum adanya Kasi Pembinaan sebagai pemaksa dilantik oleh Kasi Pemerintahan	Insolav Kasi Pemrint ekan	Kasi Pembangunan belum ada yang mampu selaruga tugas-tugas terkait perencanaan pembangunan ex. Maturbang di danda lisei Pemerintahan	Internal	C	Kasi Pembangunan belum ada yang mampu selaruga tugas-tugas terkait perencanaan pembangunan ex. Maturbang di danda lisei Pemerintahan	Instansi	1,00	3,00	3	Rendah	Mengunjungi kepada instansi terkait untuk melakukan studi terkait pengabdian lisan Kasi Pembangunan	KE
6	Pemeriksaan Rutin/Caraka dinas/operasional kendaraan Persekat Daerah	Tercukupny pemerlinaan kendaraan dinas/operasional	1.1	Kecelakaan lalu lintas	Pemeriksaan 0 Kendara an yang aman pada dines/Op erasional alan	Padaanya ada lita lita dan kurangnya kesadaran berlalu lintas pada pengguna kendaraan di jalan	Eksternal	UC	Padaanya ada lita lita dan kurangnya kesadaran berlalu lintas yang aman pada pengguna kendaraan di jalan	Instansi	1,00	2,00	2	Sangat Rendah	Mengunjungi kotampran dan pengurusan perlitua lalu lintas	E
			1.2	Biaya perawatan yang terlalu tinggi	PPTK	Uta kendaraan yang sudah berumur yang mengakibatkan banyak timbul kerusakan yang membutuhkan perbaikan dan pemerlinaan	Internal	C	Uta kendaraan yang sudah berumur yang mengakibatkan banyak timbul kerusakan yang membutuhkan perbaikan dan pemerlinaan	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah	Mengunjungi kendaraan dinas secara berkala	0
			1.3	Pengantian yang tidak seharusnya dan komponen yang tidak sesuai standar	PPTK	Kurang profesionalnya bengkel yang menjadi rekanan pemerlinaan kendaraan dinas/operasional	Eksternal	UC	Kurang profesionalnya bengkel yang menjadi rekanan pemerlinaan kendaraan dinas/operasional	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah	Melakukan studi yang terkait atas profesionalitas rekanan	E
7	Pemerlinaan prosedur dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Terpeliharanya peralatan kantor	g.1	Tidak adanya prosedur service yang profesional di wilayah kecamatan	Kesibng Umpeng	Service center dari brand lainitu bilanya hanya ada di kota besar	Eksternal	UC	Service center dari brand lainitu bilanya hanya ada di kota besar	Instansi	4,00	4,00	15	Ekstrem	Mencari service center yang ada di wilayah kecamatan	E
8	Pemerlinaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	Tercukupny pemerlinaan gedung kantor/rumah dinas	h.1	Kerusakan gedung kantor dan rumah dinas karena alam	Kesibng Umpeng	Kondisi cuaca yang ekstrim yang memuat bangunan dan perleengkapannya cepot raput dan mengahati kerusakan	Eksternal	UC	Kondisi cuaca yang ekstrim yang membuat bangunan dan perleengkapannya cepot raput dan mengahati kerusakan	Instansi	2,00	3,00	5	Moderat	Sangat doakan perbaikan membuat ahli kerusakan ingan, untuk menginder kerusakan yang lebih berat	E
			h.2	Rakaman yang rusak komputer	Kesibng Umpeng	Rakaman dalam Polaksanaan Pembangunan miteria yang egumlah tidak sesuai standar	Eksternal	UC	Rakaman dalam Polaksanaan Pembangunan miteria yang egumlah tidak sesuai standar	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah	Mengunjungi standar dan kriteria bagi calon rekanan yang akan membuat kerja sama	E
			h.3	Kurang tanggapnya pegawai menyikap kerusakler-kerusakan ringan yang berakibat kerusakan semakin parah	Kesibng Umpeng	Pada saat melitir kerusakan ringan selarusnya pegawai cepot tanggap untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut, sehingga kerusakan semakin lisek menjadi semakin parah	Internal	C	Pada saat melitir kerusakan ringan selarusnya pegawai cepot tanggap untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut, sehingga kerusakan semakin lisek menjadi semakin parah	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah	Ditunjingnya ahli pegawai yang berkecwa secara khusus mengawas kerusakan-kerusakan kecil saat dari barang milik daerah	E



9	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Terpelembunya peralatan dan perlengkapan kantor	1.1 Pegawai Pengadaan tidak memiliki sertifikat	Isuasi	Pegawai Pengadaan harus mengikuti sertifikasi pengadaan barang jasa	Internal	C	Pegawai Pengadaan harus mengikuti sertifikasi pengadaan barang jasa	Instansi	1,00	2,00	2	Sangat Rendah	Meningkatkan pegawai untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa	E
10	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengendalian dan penatausahaan keuangan	1.2 SDM yang menguasai pengadaan barang jasa terbatas bahkan tidak ada	Instansi	Tidak adanya staf yang menguasai urusan terkait pengadaan barang dan jasa	Internal	C	Tidak adanya staf yang menguasai urusan terkait pengadaan barang dan jasa	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah	Meningkatkan staf untuk mengikuti anggaran barang dan dapat dibayar pembelian barang dan jasa	NE
11	Peningkatan Kualitas Perencanaan Ketenangan dan Ketrampilan Keamanan	Meningkatnya kualitas perencanaan ketenangan dan ketrampilan keamanan	1.1 Kurang tanggapnya pegawai terhadap penanganan gangguan alam atau kejadian yang terjadi di masyarakat	Kasi	Kerena pegawai tidak up to date dengan kondisi lingkungan yang terjadi dan terbatasnya personalitrans	Internal	C	Kerena pegawai tidak up to date dengan kondisi lingkungan yang terjadi dan terbatasnya personalitrans	Masyarakat	2,00	3,00	5	Moderat	Meningkatkan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa	E
12	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengendalian dan penatausahaan keuangan	1.2 Tidak berjalannya fungsi Pengendalian dan penatausahaan keuangan	PPTK	Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan penatausahaan keuangan tidak berjalan	Internal	C	Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan penatausahaan keuangan tidak berjalan	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah	Meningkatkan fungsi pengawasan terkait pelaksanaan disiplin pemberian reward and punishment	E
13	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengendalian dan penatausahaan keuangan	1.3 Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan penatausahaan keuangan tidak berjalan	PPTK	Sangat minimnya jumlah pegawai dan pegawai yang menguasai di bidang pengendalian dan penatausahaan keuangan	Internal	C	Sangat minimnya jumlah pegawai dan pegawai yang menguasai di bidang pengendalian dan penatausahaan keuangan	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah	Meningkatkan pegawai untuk mengikuti disiplin dibayar dan kegiatan pembelian barang dan jasa	E
14	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengendalian dan penatausahaan keuangan	1.4 Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan penatausahaan keuangan tidak berjalan	PPTK	Sangat minimnya jumlah pegawai dan pegawai yang menguasai di bidang pengendalian dan penatausahaan keuangan	Internal	C	Sangat minimnya jumlah pegawai dan pegawai yang menguasai di bidang pengendalian dan penatausahaan keuangan	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah	Meningkatkan pegawai untuk mengikuti disiplin dibayar dan kegiatan pembelian barang dan jasa	E
15	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengendalian dan penatausahaan keuangan	1.5 Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengendalian dan penatausahaan keuangan tidak berjalan	PPTK	Sangat minimnya jumlah pegawai dan pegawai yang menguasai di bidang pengendalian dan penatausahaan keuangan	Internal	C	Sangat minimnya jumlah pegawai dan pegawai yang menguasai di bidang pengendalian dan penatausahaan keuangan	Instansi	0,00	0,00	0	Sangat Rendah	Meningkatkan pegawai untuk mengikuti disiplin dibayar dan kegiatan pembelian barang dan jasa	E





KRITERIA DAN SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan	Skala Nilai
1	Hampir tidak pernah terjadi	Kecil kemungkinan dan dapat diabaikan Probabilitas sangat rendah, hampir mendekati nol Peristiwa hanya timbul pada keadaan luar biasa	1
2	Jarang Sekali	Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol Mungkin terjadi sekali dalam 25 tahun Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi	2
3	Mungkin terjadi	Mungkin tenadisekali dalam 10 tahun Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50	3
4	Sering	Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun Kemungkinan terjadi > 50%	4
5	Sangat Sering	Depat terjadi beberapa kali dalam setahun	5

KRITERIA DAN SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

No	Kriteria Dampak	Definisi Kriteria Dampak	Skala Nilai
1	Tidak Berarti	Agak mengganggu pelayanan Tidak menimbulkan kerusakan Kerugian kurang dari Rp. 50.000 Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp100.000 Tidak berdampak pada pencapaian tujuan secara umum Tidak berdampak pada pencemaran/tepatasi Tidak ada/hanya berdampak kecil pada kerusakan lingkungan Cukup mengganggu jalannya pelayanan Menimbulkan kerusakan kecil Kerugian diatas Rp.50.000,- sampai Rp.1.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal) Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius	1
2	Kecil	Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000,- sampai Rp.10.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan	2
3	Sedang	Kerugian yang terjadi diatas Rp.1.000.000.000,- sampai Rp.10.000.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.1.000.000.000,- Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan	3

Contoh Tabel Frekuensi Kemungkinan Terjadinya Risiko dan Krite

Skor	Definisikriteria
1 - Hampir tidak pernah terjadi	Peristiwa hanya akan timbul pada kondisi luar biasa
2 - Jarang terjadi	Peristiwa diharapkan tidak terjadi
3 - Mungkin terjadi	Peristiwa kadang-kadang bisa terjadi
4 - Sering terjadi	Peristiwa sangat mungkin terjadi sebagian kondisi
5 - Hampir pasti terjadi	Peristiwa selalu terjadi hampir pada kondisi

Kerugian kur-

Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp25.000.000

Kerugian diatas Rp.25.000.000,- sampai Rp.50.000.000,-

Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100.000.000,-

Kerugian yang terjadi diatas Rp.100.000.000,- sampai Rp.500.000.000,-

Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.500.000.000,-



		Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan cukup besar terhadap lingkungan	
		Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu Adanya kekerasan, ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama Kerugian yang terjadi diatas Rp. 10.000.000,- sampai Rp. 50.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp. 5.000.000,- Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional) Adanya kerusakan besar terhadap lingkungan Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu Kerusakan Fatal Kerugian yang terjadi diatas Rp. 50.000.000,- Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp. 5.000.000,-	
4	Besar		4
5	Besar Sekali	Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan Merusak citra institusi dalam skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak Terjadinya KKN dan diproses secara hukum	5

Kerugian yang terjadi diatas Rp. 500.000.000,- sampai Rp. 1.000.000.000,-

Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,-

Kerugian yang terjadi diatas Rp. 1.000.000.000,-

Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,-

**RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
1	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM	Kaderisasi staf yang kompeten menduduki posisi-posisi penting instansi untuk mengikuti Assessment/penilaian kompetensi	Sekretaris Kecamatan	1 Semester
2	Penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan.	Pembuatan SOP yang mengatur tentang Reward dan Punishment Pegawai	Sekretaris Kecamatan	1 Semester


  
 14 Desember 2022  
 CAMLAT WANGSON  
 ARIE EPEMDI, AP, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19739603 199403 1 003

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	2	3	4	5
1	Petugas pemungut PBB yang kurang amanah	Dilaksanakan pemantauan dan pembinaan terhadap petugas pemungut PBB	Kasi Pemerintahan	2 semester
2	Jadwal Pemantauan PBB yang sering bertabrakan dengan kegiatan lain	Dilakukan perencanaan yang matang terkait pelaksanaan jadwal pemantauan	Kasi Pemerintahan	1 semester
3	Kurangnya SDM di bidang permas sehingga banyak tugas terkait permas belum maksimal	Meminta penambahan jumlah personil	Kasi Permas	4 semester
4	Data base kemiskinan yang dinamis	Berkoordinasi dengan instansi yang membidangi terkait database kemiskinan	Kasi Permas	4 semester
5	Kurangnya SDM di Kasi Pemerintahan sehingga belum optimalnya Binwas APBDes	Meminta penambahan jumlah personil	Kasi Pemerintahan	4 semester
6	Pemohon belum komplit membawa persyaratan sehingga sering menyulitkan pelayanan	Mengedukasi masyarakat terkait administrasi kependudukan	Kasi Pelayanan	1 semester
7	Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan berbasis TIK	Pengarahan secara rutin dari Kasi Pelayanan tentang pelayanan PATEN	Kasi Pelayanan	4 semester
8	Belum adanya Kasi Pembangunan sehingga terpaksa dihandle oleh Kasi Pemerintahan	Melaporkan kepada instansi yang membidangi analisis jabatan	Kasi Pemerintahan	2 semester
9	Kecelakaan lalu lintas	Mengingatkan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas untuk memeriksa kelengkapan berkendara dan tertib dalam mengikuti peraturan berlalu-lintas	Para Kasi dan Kasubbag	1 semester
10	Biaya perawatan yang terlalu tinggi	Mengusulkan penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak ekonomis dan tidak produktif	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2 semester
11	Penggantian yang tidak seharusnya dan komponen yang tidak sesuai standar	Melakukan evaluasi setiap saat akan dilaksanakan penggantian komponen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 semester
12	Tidak adanya penyedia service yang profesional di wilayah kecamatan	Mengirim unit yang rusak ke service centre resmi di kota kabupaten	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 semester
13	Kerusakan gedung kantor dan rumah dinas karena alam	Meminimalisir kemungkinan kerusakan yang diakibatkan oleh alam	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2 semester
14	Rekanan yang tidak kompeten	Melakukan seleksi ketat terhadap Kapasitas dan Kapabilitas Rekanan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 semester
15	Kurang tanggapnya pegawai menyikapi kerusakan-kerusakan ringan yang berakibat kerusakan semakin parah	Membenkan pengarahan secara berkala dan meningkatkan kepedulian pegawai akan lingkungan kerjanya	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	2 semester
16	Pejabat Pengadaan tidak memiliki sertifikat	Mendaftarkan pegawai agar mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1 semester
17	SDM yang menguasai pengadaan barang jasa terbatas bahkan tidak ada	Meminta penambahan jumlah personil	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2 semester
18	Petugas yang tidak kompeten di bidangnya	Melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2 semester
19	Kurangnya sumber daya manusia	Mengajukan penambahan jumlah personil	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	4 semester



20	Tidak berjalannya fungsi Pengendalian dan penatausahaan keuangan	Memberikan edukasi yang lebih terhadap pegawai yang bertugas dalam fungsi pengendalian dan penatausahaan keuangan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2 semester
21	Kurang tanggapnya pegawai terhadap penanganan gangguan alam atau kejadian yang terjadi di masyarakat.	Melakukan koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas di tingkat Kecamatan	Kasi Trantibum	2 semester
22	Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mematuhi jadwal waktu dan tempat operasional	Mengedukasi pedagang kaki lima dan melakukan operasi terjadwal	Kasi Trantibum	2 semester
23	Banyaknya pelaku tindak kriminal	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait tindak kriminalitas	Kasi Trantibum	1 semester
24	Banyaknya kegiatan masyarakat dan Pemerintah dalam skala besar yang terjadi bersamaan	Meningkatkan koordinasi lintas sektoral pada saat melaksanakan perencanaan pelaksanaan kegiatan	Kasi Trantibum	1 semester
25	Belum jelasnya status pegawai	Mengusulkan penegasan status pegawai yang membidangi pengelolaan trantibum	Kasi Trantibum	2 semester
26	Rekanan yang tidak Ber NPWP	Melakukan seleksi ketat terhadap kapasitas dan kapabilitas rekanan	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1 semester
27	Sering terjadinya listrik mati dan anjlog	Pengurangan pemakaian AC	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	2 semester
29	Terjadinya penyalahgunaan kegiatan perjalanan dinas	Pengawasan dan evaluasi yang bekesinambungan dari pimpinan, terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1 semester
30	Terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan perjalanan dinas	Mengingatkan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas untuk memeriksa kelengkapan berkendara dan terfob dalam mengikuti peraturan berfalu-lintas	Sekretaris Kecamatan	1 semester
31	Rapat yang diikuti tidak oleh yang berkompeten menangani perihal rapat	Melakukan pembagian tugas dan evaluasi secara berkelanjutan	Sekretaris Kecamatan	1 semester


  
 Wangon, Desember 2022  
 CAMAT WANGON  
 ARIF EPENDYAP, M.Si  
 Pembina, Tingkat I  
 NIP. 19730603 199403 1 003

## RENCANA TINDAK PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Belum Memadai	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan	Penanggung Jawab Pelaksanaan Perbaikan	Target Waktu Penyelesaian
1	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM	Kadenisasi staf yang kompeten menduduki posisi-posisi penting instansi untuk mengikuti Assessment/penilaian kompetensi	Sekretaris Kecamatan	1 Semester
2	Penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan.	Pembuatan SOP yang mengatur tentang Reward dan Punishment Pegawai	Sekretaris Kecamatan	1 Semester



Wampon, Desember 2022  
 ARIE EFENDI, AP, M.Si  
 Pembina-Tingkat I  
 NIP. 19730603 199403 1 003

### DAFTAR RISIKO PRIORITAS TERIDENTIFIKASI KECAMATAN WANGON

VISI : Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur, dan Mandiri

MISI : Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN	NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			PIHAK YG TERKENA	DAMPAK
						SUMBER	U/C	URAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Fasilitas Intensifikasi PBB	Meningkatkan target perolehan PBB	a.1	Petugas pemungut PBB yang kurang amanah	Desa	Internal	C	Seringkali dana Pungutan PBB dipakai Pemungut terlebih dahulu	Wajib Pajak dan desa	Pembayaran PBB tersentat
			a.2	Jakwal Pemantauan PBB yang sering betabrakan dengan kegiatan lain	Institusi	Internal	C	Jadwal Pemantauan yang betabrakan dengan kegiatan kasi lain sering membuat pemantauan PBB didesa kurang optimal	Institusi	Pemantauan Pembayaran PBB di kurang optimal serta jawdal harus segera disesuaikan sehingga tidak terjadi dobel anggaran terkait SPf Desa
2	Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penguanguangan Kemiskinan Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan fasilitas pemberdayaan masyarakat dan tim penguanguangan kemiskinan kecamatan	b.1	Kurangnya SDM di bidang permas sehingga banyak tugas terkait permas belum maksimal	Kasi Permas	Internal	C	Staf Permas hanya 1 tapi tupoksi permas sangat banyak dan tidak seimbang	Kasi Permas	Tupoksi terkait Permas kurang maksimal dan butuh beberapa sta teknis lagi
			b.2	Data base kemiskinan yang dinamis	Kasi Permas	Eksternal	UC	Data kemiskinan yang selalu berubah-ubah terkadang harus mengulang pendataan	Kasi Permas	Untuk penyaluran bantuan terkait: banyak complain akibat data yang kurang up to date
3	Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan	Tertaksananya kegiatan fasilitas pembinaan dan pengawasan APBDes	c.1	Kurangnya SDM di Kasi Pemerintahan sehingga belum optimalnya Birwas APBDes	Kasi Pemerintahan	Internal	C	Kurangnya staf di Kasi Pemerintahan khususnya yang menguasai Aturan terkait APBDes	Kasi Pemerintahan	Birwas APBDes belum maksimal karena kekurangan SDM/ Staf yai menguasai Aturan terkait APBDes sehingga harus melibatkan kasi la atau subag lain yang oada akhirm
4	Fasilitas penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Terselenggaranya fasilitas penyelenggaraan pelayanan kecamatan	d.1	Pemohon belum komplit membawa persyaratan sehingga sering menyulitkan pelayanan	Kasi Pelayanan	Eksternal	UC	Pemohon belum komplit membawa persyaratan sehingga sering menyulitkan pelayanan	Kasi Pelayanan	Pelayanan ditambah sering teke komplain



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN	NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			DAMPAK	
						SUMBER	U/C	URAIAN	PIHAK YG TERKENA	URAIAN
5	fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi pembangunan di tingkat Kecamatan	e.1	Belum adanya Kasi Pembangunan sehingga terpaksa dihandle oleh Kasi Pemerintahan	Institusi/ Kasi Pemerintahan	Internal	C	Kasi Pembangunan belum ada yang mampu sehingga tugas-tugas terkait perencanaan pembangunan ex Musrenbang di handle kasi Pemerintahan	Institusi	Belum optimalnya kegiatan perencanaan dan pembangunan serta terjadi tumpah tindih tupoksi
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	Tercukupinya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	f.1	Kecelakaan lalu lintas	Pemegang Kendaraan dinas/Operasional	Eksternal	UC	Padaanya arus lalu lintas dan kurangnya kesadaran berlalu lintas yang aman pada pengguna kendaraan di jalan	Institusi	Kerusakan dari mulai skala kecil t besar, bahkan sampai dengan ttd dapat dipergunakan
			f.2	Biaya perawatan yang terlalu tinggi	PPTK	Internal	C	Usia kendaraan yang sudah berumur yang mengakibatkan banyak timbul kerusakan yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan	Institusi	Semakin tingginya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
			f.3	Penggantian yang tidak seharusnya dan komponen yang tidak sesuai standar	PPTK	Eksternal	UC	Kurang profesionalnya bengkel yang menjadi rekanan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Institusi	Penggantian komponen yang tda sesuai standar akan mengakibatkan kerusakan pada komponen lain yr berimbas pada besarnya biasa perbaikan/pemeliharaan
7	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Terpeliharanya peralatan kantor	g.1	Tidak adanya penyedia service yang profesional di wilayah kecamatan	Kasubag Umpeg	Eksternal	UC	Service centre dari brand tertentu biasanya hanya ada di kota besar	Institusi	Hasil perbaikan/pemeliharaan yar tidak sesuai dengan standar
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	Terukupinya pemeliharaan gedung kantor/rumah dinas	h.1	Kerusakan gedung kantor dan rumah dinas karena alam	Kasubag Umpeg	Eksternal	UC	Kondisi cuaca yang ekstrim yang membuat bangunan dan perengkapannya cepat rapuh dan mengalami kerusakan	Institusi	Rusak dan rapuhnya bangunan yr mengakibatkan pembengkakan pi anggaran pemeliharaan
			h.2	Rekanan yang tidak kompeten	Kasubag Umpeg	Eksternal	UC	Rekanan dalam Pelaksanaan Pembangunan material yang digunakan tidak sesuai standar	Institusi	Bangunan yang rapuh dan mudah rusak mengakibatkan renovasi bangunan kembali

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN	NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			DAMPAK	
						SUMBER	UIC	URAIAN	PIHAK YG TERKENA	URAIAN
9	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Terpenuhiya peralatan dan perlengkapan kantor	h.3	Kurang tanggapnya pegawai menyikapi kerusakan-kerusakan ringan yang berakibat kerusakan semakin parah	Kasubag Umpug	Internal	C	Pada saat melihat kerusakan ringan seharusnya pegawai cepat tanggap untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut, sehingga kerusakan tidak menjadi semakin parah	Institusi	Kerusakan yang kecil apabila dibiarkan maka akan menjadi semakin parah, imbasnya adalah pembengkakan pada anggaran pemeliharaan
						Internal	C	Pejabat Pengadaan harus mengikuti sertifikasi pengadaan barang jasa	Institusi	Kurang memenuhi syarat syarat pengadaan barang jasa yang baik sesuai aturan
						Internal	C	Tidak adanya staf yang menguasai aturan terkait pengadaan barang dan jasa	Institusi	Kurang memenuhi syarat syarat pengadaan barang jasa yang baik sesuai aturan
10	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	Terselenggaranya pengendalian dan penatausahaan keuangan	j.1	Pelugas yang tidak kompeten di bidangnya	PPTK	Internal	C	Pelugas yang ditunjuk menjadi pengendali dan penatausahaan keuangan tidak kompeten dan secara maksimal bekerja sesuai bidang tugasnya	Institusi	Pengawasan yang seharusnya dilaksanakan tidak bisa dijalankan dengan baik, dan pembagian tugas yang tidak jelas
						Internal	C	Sangat minimnya jumlah pegawai, dan pegawai yang menguasai di bidang pengendalian dan penatausahaan keuangan	Institusi	Pelaksanaan pekejaan menjadi lebih dan tidak sesuai dengan prosedur
						Internal	C	Pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi pengendalian dan penatausahaan keuangan tidak berjalan	Institusi	Beban yang terlalu berat bagi pegawai dan tidak adanya pengecekan serta check and recheck
11	Peningkatan Kualitas Penanganan Ketertarikan dan Ketertiban Kecamatan	Meningkatnya kualitas penanganan ketertarikan dan ketertiban kecamatan	k.1	Kurang tanggapnya pegawai terhadap penanganan gangguan alam atau kejadian yang terjadi di masyarakat.	Kasi Tranrib	Internal	C	Karena pegawai tidak up to date dengan kondisi lingkungan yang terjadi dan terbatasnya personil tranrib	Masyarakat	Terlambat dalam penanganan gangguan alam yang terjadi
						Eksternal	UC	Banyaknya pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di sembarang tempat dan waktu membuat pemandangan yang tidak nyaman dan mengganggu aktifitas pejalan kaki	Masyarakat	Susana kota menjadi kumuh dan terlihat tidak tertata rapi, dan pejalan kaki tidak mempunyai akses untuk melintasi trotoar yang seharusnya menjadi milik pejalan kaki
			k.2	Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mematuhi jadwal waktu dan tempat operasional	Masyarakat	Eksternal	UC	Banyaknya pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di sembarang tempat dan waktu membuat pemandangan yang tidak nyaman dan mengganggu aktifitas pejalan kaki	Masyarakat	Susana kota menjadi kumuh dan terlihat tidak tertata rapi, dan pejalan kaki tidak mempunyai akses untuk melintasi trotoar yang seharusnya menjadi milik pejalan kaki



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN	NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			PIHAK YG TERKENA	DAMPAK
						SUMBER	URAIAN	URAIAN		
			k.3	Banyaknya pelaku tindak kriminal	Masyarakat	Eksternal	UC	Karena persoalan sosial dan ekonomi, banyak mengakibatkan timbulnya kejahatan dan kriminalitas serta gangguan keamanan	Masyarakat	Menurunnya rasa aman dan kenyamanan masyarakat.
			k.4	Banyaknya kegiatan masyarakat dan Pemerintah dalam skala besar yang terjadi bersamaan	Masyarakat	Eksternal	UC	Kegiatan masyarakat maupun pemerintah yang mengundang partisipasi masyarakat dalam skala besar, meningkatkan resiko terjadinya gangguan kamtibmas	Masyarakat	Berkurangnya rasa aman dan kenyamanan masyarakat
			k.5	Belum jelasnya status pegawai	Seksi Trantubum	Eksternal	UC	Karena masih dalam tahap penataan mengakibatkan masih belum jelasnya status pegawai pengelola trantubum	Pegawai	Menurunnya kinerja Pegawai Perantubum
12	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	Tercukupinya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	l.1	Rekaman yang tidak Bar NPWP	Bendahara	Eksternal	UC	Rekaman yang belum membuat NPWP	Bendahara	Pajak yang disetor jadi lebih tinggi
13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	Tercukupinya kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	m.1	Sering terjadinya listrik mati dan anjlog	Instansi	Eksternal	UC	Rekaman tidak kompeten karena pembagian daya listrik tidak seimbang	Instansi	Menghambat pelayanan kepada masyarakat dan mengganggu kelancaran kinerja pegawai
14	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	Tercukupinya tenaga administrasi, keamanan, pengemudi dan kebersihan	n.1	Tidak adanya tenaga Pengemudi sehingga jika sewaktu-waktu ada kegiatan mendadak terpaksa dihandle oleh pegawai yang bisa mengemudi	Instansi	Internal	C	Karena belum adanya rekrutmen tenaga pengemudi	Pegawai	Mengganggu kinerja pegawai yang ditugasi untuk mengemudi sehingga tidak sesuai tupoksinya
15	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	o.1	Terjadinya penyalahgunaan kegiatan perjalanan dinas	Kecamatan Wangon	Internal	C	Adanya perjalanan dinas fiktif	Instansi	Terjadinya kebocoran anggaran yang tidak perlu
			o.2	Terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan perjalanan dinas	Pelaksana	Eksternal	UC	Padatnya arus lalu lintas dan kurangnya kesadaran berlalu lintas yang aman pada pengguna kendaraan di jalan	Pelaksana	Kerugian materiil dan non materiil



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TUJUAN	NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			DAMPAK	
						SUMBER	U/C	URAIAN	PIHAK YG TERKENA	URAIAN
			0.3	Rapat yang diikuti tidak oleh yang berkompeten menangani perihal rapat	Kecamatan Wangon	Internal	C	Padatnya kegiatan rapat sehingga harus dilaksanakan pembagian tugas	Institusi	Kurang terserap dan tersalurkan maksud rapat



**FORMULIR ANALISIS RESIKO  
KECAMATAN WANGON**

No	Program Kegiatan	Nomor Risiko	Uraian Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Skor Status	Level Resiko
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Fasilitasi Intensifikasi PBB	a.1	Petugas pemungut PBB yang kurang amah	5,00	2,00	10,00	Tinggi
		a.2	Jadwal Pemantauan PBB yang sering bertabrakan dengan kegiatan lain				
2	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dan Tim Penganggulangan Kemiskinan Kecamatan	b.1	Kurangnya SDM di bidang permas sehingga banyak tugas terkait permas belum maksimal	3,00	2,00	6,00	Moderat
		b.2	Data base kemiskinan yang dinamis				
3	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan APBDes Kecamatan	c.1	Kurangnya SDM di Kasi Pemerintahan sehingga belum optimalnya Binwas APBDes	2,00	1,00	2,00	Sangat Rendah
4	Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	d.1	Pemohon belum komplit membawa persyaratan sehingga sering menyulitkan pelayanan	2,00	1,00	2,00	Sangat Rendah
		d.2	Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan berbasis TIK	4,00			
5	Fasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa / Kelurahan	e.1	Belum adanya Kasi Pembangunan sehingga terpaksa dihandle oleh Kasi Pemerintahan	3,00	1,00	3,00	Rendah
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dinas/operasional kendaraan Perangkat Daerah	f.1	Kecelakaan lalu lintas	2,00	1,00	2,00	Sangat Rendah
		f.2	Biaya perawatan yang terlalu tinggi				
		f.3	Penggantian yang tidak seharusnya dan komponen yang tidak sesuai standar				
7	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	g.1	Tidak adanya penyedia service yang profesional di wilayah kecamatan	4,00	4,00	16,00	Ekstrem
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perangkat Daerah	h.1	Kerusakan gedung kantor dan rumah dinas karena alam	3,00	2,00	6,00	Moderat
		h.2	Rekanan yang tidak kompeten				
		h.3	Kurang tanggapnya pegawai menyikapi kerusakan-kerusakan ringan yang berakibat kerusakan semakin parah				
9	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	i.1	Pajabat Pengadaan tidak memiliki sertifikat	2,00	1,00	2,00	Sangat Rendah
		i.2	SDM yang menguasai pengadaan barang jasa terbatas bahkan tidak ada				
10	Pengendalian dan Penatausahaan Keuangan Daerah Perangkat Daerah	j.1	Petugas yang tidak kompeten di bidangnya	2,00	2,00	4,00	Rendah
		j.2	Kurangnya sumber daya manusia				
		j.3	Tidak berjalannya fungsi Pengendalian dan penatausahaan keuangan				
11	Peningkatan Kualitas Penanganan Kelentraman dan Keterlibatan Kecamatan	k.1	Kurang tanggapnya pegawai terhadap penanganan gangguan alam atau kejadian yang terjadi di	3,00	2,00	6,00	Moderat
		k.2	Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mematuhi jadwal waktu dan tempat operasional				
		k.3	Banyaknya pelaku tindak kriminal				
		k.4	Banyaknya kegiatan masyarakat dan Pemerintah dalam skala besar yang terjadi bersamaan				
		k.5	Belum jelasnya status pegawai				
12	Penyediaan bahan logistik kantor Perangkat Daerah	l.1	Rekanan yang tidak Ber NIPWP	2,00	2,00	4,00	Rendah
13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Perangkat Daerah	m.1	Sering terjadinya listrik mati dan anjlog	2,00	1,00	2,00	Sangat Rendah
14	Penyediaan Tenaga Administrasi, keamanan, pengemudi, dan kebersihan Perangkat Daerah	n.1	Tidak adanya tenaga Pengemudi sehingga jika sewaktu-waktu ada kegiatan mendadak terpaksa dihandle oleh pegawai yang bisa mengemudi	2,00	1,00	2,00	Sangat Rendah
15	Rapat-rapat, Koordinasi, Konsultasi dan perjalanan dinas Perangkat Daerah	o.1	Terjadinya penyalahgunaan kegiatan perjalanan dinas	2,00	2,00	4,00	Rendah
		o.2	Terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan perjalanan dinas				
		o.3	Rapat yang diikuti tidak oleh yang berkompeten menangani perihal rapat				



NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB		PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	E/ KE/ TE	PENGENDALIAN YANG MASIH DIPERLUKAN	BENTUK DAN SARANA INFORMASI	KEGIATAN PEMANTAUAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMANTAU		
			SUMBER	U/C							URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
c.1	Kurangnya SDM di Kasi Pemerintahan sehingga belum optimalnya Binwas APBDes	Kasi Pemerintahan n	Internal	C	Kurangnya staf di Kasi Pemerintahan khususnya yang menguasai Aturan terkait APBDes	Binwas APBDes belum maksimal karena kekurangan SDM/ Staf yang menguasai Aturan terkait APBDes sehingga harus melibatkan kasi lain atau subag lain yang ada akhirnya terjadi tumpang tindih tupoksi	Meminta penambahan jumlah personil	KE	Mengajukan untuk dilaksanakan analisis jabatan di lingkungan pengendalian sebagai dasar permohonan penambahan jumlah personil	Surat, Telepon dan WhatsApp	Analisis Jabatan	Kasi Pemerintahan
d.1	Pemohon belum komplit membawa persyaratan sehingga sering menyulitkan pelayanan	Kasi Pelayanan	Eksternal	U	Pemohon belum komplit membawa persyaratan sehingga sering menyulitkan pelayanan	Pelayanan terhambat sering terkena komplain	Mengedukasi masyarakat terkait administrasi kependudukan	E	Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnyaاتب administratif kependudukan	Poster dan Media sosial	Mengaktifkan penggunaan poster dan media sosial	Kasi Pelayanan
d.2	Kurangnya SDM yang mempunyai kemampuan berbasis TIK	Kasi Pelayanan	Internal	C	Tidak adanya pelatihan untuk pegawai yang masih kurang kompeten dalam pekerjaan yang berbasis komputer	Menghambat kinerja Pelayanan kepada masyarakat yang berbasis komputer	Pengarahan secara rutin dari Kasi Pelayanan tentang pelayanan PATEN	E	Mengusulkan Pegawai untuk mengikuti Simtek tentang Pelayanan PATEN	Surat, Telepon dan WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasi Pelayanan
e.1	Belum adanya Kasi Pembangunan sehingga terpaksa dihandle oleh Kasi Pemerintahan	Institusi/ Kasi Pemerintahan n	Eksternal	UC	Kasi Pembangunan belum ada yang mampu sehingga tugas-tugas terkait perencanaan pembangunan ex Musrenbang dll dihandle kasi Pemerintahan	Belum optimalnya kegiatan perencanaan dan pembangunan desa serta terjadi tumpang tindih tupoksi	Melaporkan kepada instansi yang membina/ menganalisis jabatan	KE	Mengusulkan kepada instansi terkait untuk melakukan analisis terkait penguasaan jabatan Kasi Pembangunan	Surat, Telepon dan WhatsApp	Mengunggu informasi Palantikan Kasi Pembangunan dan Kabupaten	Kasi Pemerintahan



NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	E/ KE/ TE	PENGENDALIAN YANG MASH DIPERLUKAN	BENTUK DAN SARANA INFORMASI	KEGIATAN PENANTAUAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMANTAU	
			SUMBER	U/C	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
f.1	Kecelakaan lalu lintas	Pemegang Kendaraan dinas/Operasional	Eksternal	UC	Padatnya arus lalu lintas dan kurangnya kesadaran bertalu lintas yang aman pada pengguna kendaraan di jalan	Kerusakan dari mulai skala kecil hingga besar, bahkan sampai dengan tidak dapat dipergunakan	Mengingatkan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas untuk memeriksa kelengkapan berkendaraan terlebih dalam mengikuti peraturan bertalu-lintas.	E	Meningkatkan keterampilan dan penguasaan peraturan lalu lintas	Surat, Telepon, Apel, WhatsApp Group, Media Sosial	Sering menyampaikan pentingnya safety driving	Para Kasid dan Kasubbag
12	Biaya perawatan yang terlalu tinggi	Subbag PK	Eksternal	UC	Usia kendaraan yang sudah berumur yang mengakibatkan banyak timbul kerusakan yang membutuhkan perbaikan dan pemeliharaan	Semakin tingginya anggaran pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Mengusulkan penghapusan barang milik daerah yang sudah tidak ekonomis dan tidak produktif		Menginventarisir kendaraan dinas secara berkala	Surat, Telepon, WhatsApp	Secara teratur memeriksa usia kendaraan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
13	Pengantian yang tidak seharusnya dan komponen yang tidak sesuai standar	Subbag PK	Eksternal	UC	Kurang profesionalnya bengkel yang menjadi rekanan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Pengantian komponen yang tidak sesuai standar akan mengakibatkan kerusakan pada komponen lain yang berimbas pada besarnya biaya perbaikan/pemeliharaan	Melakukan evaluasi setiap saat akan dilaksanakan penggantian komponen	E	Melakukan seleksi yang ketat atas profesionalitas rekanan	Surat, Telepon, WhatsApp Group, Poster, Spanduk dan Media Sosial	Memperluas jaringan dan informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
g.1	Tidak adanya penyedia service yang profesional di wilayah kecamatan	Sumpeg	Eksternal	UC	Service centre dari brand tertentu biasanya hanya ada di kota besar	Hasil perbaikan /pemeliharaan yang tidak sesuai dengan standar	Mengirim unit yang rusak ke service centre resmi di kota kabupaten	E	Mencari service centre yang ada di wilayah kecamatan	Surat, Telepon, WhatsApp Group, Media Sosial	Memperluas jaringan dan informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			PENGDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	E/ KE/ TE	E/ MASH DIPERLUKAN	BENTUK DAN SARANA INFORMASI	KEGIATAN PEMANTAUAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMANTAU	
			SUMBER	U/C	URAIAN							
1	2 Kerusakan gedung kantor dan rumah dinas karena alam	3 Sumpeng	4 Eksternal	5 UC	6 Kondisi cuaca yang ekstrin yang membuat bangunan dan perengkapannya cepat rapuh dan mengalami kerusakan	7 Rusak dan rapuhnya bangunan yang mengakibatkan pembengkakan pada anggaran pemeliharaan	8 Meminimalisir kemungkinan kerusakan yang diakibatkan oleh alam	9 E	10 Segera diadakan perbaikan manakala ada kerusakan ringan, untuk menghindari kerusakan yang lebih berat	11 Surat, Telepon, Ape!, WhatsApp Group	12 Pemeriksaan Lingkungan	13 Kasubag Umum dan Kepegawaian
h.2	Rekaman yang tidak kompeten	Kasubag Umpeg	Eksternal	UC	Rekaman dalam Pelaksanaan Pembangunan material yang digunakan tidak sesuai standar	Bangunan yang rapuh dan mudah rusak mengakibatkan renovasi bangunan kembali	Melakukan seleksi ketat terhadap Kapasitas dan Kapabilitas Rekaman	E	Meningkatkan standar dan kriteria bagi calon rekaman yang akan menjadi kerja sama	Surat, Telepon, Media Sosial	Memperluas jaringan dan informasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
h.3	Kurang tanggapnya pegawai menyikapi kerusakan-kerusakan ringan yang berakibat kerusakan semakin parah	Sumpeng	Internal	C	Pada saat melihat kerusakan ringan seharusnya pegawai cepat tanggap untuk segera memperbaiki kerusakan tersebut, sehingga kerusakan tidak menjadi semakin parah	Kerusakan yang kecil apabila dibiarkan maka akan menjadi semakin parah dan berat. Imbensya adalah pembengkakan pada anggaran pemeliharaan	Memberikan pengarahan secara berkala dan meningkatkan kepedulian pegawai akan lingkungan kerjanya	E	Ditunjuknya satu pegawai yang bertugas secara khusus mengawasi kerusakan-kerusakan kecil aset dan barang milik daerah	Surat, Telepon, Ape!, WhatsApp	Pemantauan Lingkungan	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
1.1	Pegabat Pengadaan tidak memiliki sertifikat	Institusi	Internal	C	Pegabat Pengadaan harus mengikuti sertifikasi pengadaan barang jasa	Kurang memenuhi syarat syarat pengadaan barang jasa yang baik dan sesuai aturan	Mendatarkan pegawai agar mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa	E	Mengirimkan pegawai untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Surat, Telepon, WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
1.2	SDM yang menguasai pengadaan barang jasa terbatas bahkan tidak ada	Institusi	Internal	C	Tidak adanya staf yang menguasai aturan terkait pengadaan barang dan jasa	Kurang memenuhi syarat syarat pengadaan barang jasa yang baik dan sesuai aturan	Meminta penambahan jumlah personil	KE	Mengirimkan staf untuk mengikuti bimbingan teknis dan diklat-diklat pengadaan barang dan jasa	Surat, Telepon, WhatsApp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian

NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB		PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	E/ KE/ TE	PENGENDALIAN YANG MASIH DIPERLUKAN	BENTUK DAN SARANA INFORMASI	KEGIATAN PEMANTAUAN	PIHAK YANG BERANGGUNG JAWAB MEMANTAU		
			SUMBER	U/C							URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
J.1	Petugas yang tidak kompeten di bidangnya	Subbag PK	Internal	C	Petugas yang ditunjuk menjadi pengendali dan penatausahaan keuangan tidak kompeten dan secara maksimal bekerja sesuai bidang tugasnya	Pengawasan yang seharusnya dilaksanakan tidak bisa dijalankan dengan baik, dan pembagian tugas yang tidak jelas	Melakukan evaluasi atas hasil pekerjaan dan mendokumentasi hasil evaluasi tersebut	E	Mengingatkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan pegawai lainnya	Surat, Telepon, Whatsa-pp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawain
J.2	Kurangnya sumber daya manusia	Subbag PK	Eksternal	UC	Sangat minimnya jumlah pegawai, dan pegawai yang menguasai di bidang pengendalian dan penatausahaan keuangan	Pelaksanaan pekerjaan menjadi lambat dan tidak sesuai dengan prosedur	Mengajukan penambahan jumlah personil	E	Mengingatkan pegawai untuk mengikuti diklat teknis dan kegiatan peningkatan kemampuan pegawai lainnya	Surat, Telepon, Whatsapp Group	Memperluas jaringan dan informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawain
J.3	Tidak berjalannya fungsi Pengendalian dan penatausahaan keuangan	Subbag PK	Internal	C	Pegawai yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi pengendalian dan penatausahaan keuangan tidak berjalan	Beban yang terlalu berat bagi sebagian pegawai dan tidak adanya pengawasan serta check and recheck	Memberikan edukasi yang lebih terhadap pegawai yang bertugas dalam fungsi pengendalian dan penatausahaan keuangan	E	Meningkatkan fungsi pengawasan melekat, penegakan disiplin, pemberian reward and punishment	Surat, Telepon, Appel, Whatsapp Group, Media Sosial	Memperluas jaringan dan informasi	Kasubbag Umum dan Kepegawain
K.1	Kurang tanggapnya pegawai terhadap penanganan gangguan alam atau kejadian yang terjadi di masyarakat.	Kasi Trantib	Internal	C	Karena pegawai tidak up to date dengan kondisi lingkungan yang terjadi dan terbalasnya personil trantib	Terlambat dalam penanganan gangguan alam yang terjadi	Melakukan koordinasi dengan Babinsa dan Babinkamtibmas di tingkat Kecamatan	E	Meningkatkan koordinasi dengan Forkompincam dan Desa	Surat, Telepon, Whatsapp	Patrol rutin seluruh wilayah Kecamatan Wangan	Kasi Trantibum



NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB			PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	E/ KE/ TE	PENGENDALIAN YANG MASIH DIPERLUKAN	BENTUK DAN SARANA INFORMASI	KEGIATAN PEMANTAUAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMANTAU	
			SUMBER	U/C	URAIAN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
k.2	Banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mematuhi jadwal waktu dan tempat operasional	Masyarakat	Eksternal	UC	Banyaknya pedagang kaki lima yang menggelar dagangan di sembarang tempat dan waktu membuat pemandangan yang tidak nyaman dan mengganggu aktifitas pejalan kaki	Suasana kota menjadi kumuh dan terlihat tidak tertata rapi, dan pejalan kaki tidak mempunyai akses untuk melintasi trotoar yang seharusnya menjadi milik pejalan kaki	Mengedukasi pedagang kaki lima dan melakukan operasi terpadu	E	Menambah jumlah rambu-rambu di lingkungan tempat-tempat yang dilarang	Surat, Telepon, Whatsapp Group, Media Sosial	Patroli rutin dan terpadu	Kasi Trantibum
k.3	Banyaknya pelaku tindak kriminal	Masyarakat	Eksternal	UC	Karena persoalan sosial dan ekonomi, banyak mengakibatkan timbulnya kejahatan dan kriminalitas serta gangguan ketertibatan	Menurunnya rasa aman dan kenyamanan masyarakat	Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait tindak kriminalitas	KE	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan ketertibatan lingkungan melalui sis-kamling	Surat, Telepon, Whatsapp Group, Media Sosial	Patroli rutin dan terpadu	Kasi Trantibum
k.4	Banyaknya kegiatan masyarakat dan Pemerintah dalam skala besar yang terjadi bersamaan	Masyarakat	Eksternal	UC	Kegiatan masyarakat maupun pemerintah yang mengundang partisipasi masyarakat dalam skala besar, meningkatkan resiko terjadinya gangguan kamtibmas	Berkurangnya rasa aman dan kenyamanan masyarakat	Meningkatkan koordinasi lintas sektoral pada saat melaksanakan pelaksanaan kegiatan	E	Melakukan perencanaan yang matang terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah dan menginformasikannya kepada masyarakat	Surat, Telepon, Whatsapp Group, Media Sosial	Memperluas jaring dan informasi	Kasi Trantibum
k.5	Belum jelasnya status pegawai	Seksi Trantibum	Eksternal	UC	Karena masih dalam tahap penataan mengakibatkan masih belum jelasnya status pegawai pengelola trantibum	Menurunnya kinerja Pegawai Pengelola Trantibum	Mengusulkan penegeasan status pegawai yang membina pengelolaan trantibum	E	Mengajukan untuk dilaksanakan analisis jabatan di lingkungan pengendalian sebagai dasar pemohonan penambahan jumlah personil	Surat, Telepon, Whatsapp	Pembinaan Pegawai	Kasi Trantibum

NOMOR RESIKO	PERNYATAAN RESIKO	PEMILIK RESIKO	PENYEBAB		PENGENDALIAN YANG TELAH DILAKUKAN	E/KE/TE	PENGENDALIAN YANG MASIH DIPERLUKAN	BENTUK DAN SARANA INFORMASI	KEGIATAN PEMANTAUAN	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MEMANTAU		
			SUMBER	U/C							URAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Rekaman yang tidak Ber NPWP	Bendahara	eksternal	U	Rekaman yang tidak Ber NPWP	Kesulitan membayar Pajak daerah/ pajak restoran	Melakukan seleksi ketat terhadap kapasitas dan kapabilitas rekanan	E	Memberikan pengetahuan kepada pelaku usaha akan pentingnya kelengkapan administrasi, terutama NPWP	Surat, Telepon, Whatsapp Group, Media Sosial	-	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
m.1	Sering terjadinya listrik mati dan anlog	Instansi	Eksternal	UC	Rekaman tidak kompeten karena pembagian daya listrik tidak seimbang	Menghambat pelayanan kepada masyarakat dan mengganggu kelancaran kinerja pegawai	Pengurangan pemakaian AC	E	Melakukan penambahan Daya Listrik	Surat, Telepon Sosial	Koordinasi dan dengan Pegawai PLN	Kasubag Umum dan Kepegawaian
n.1	Tidak adanya tenaga Pengemudi sehingga jika sewaktu-waktu ada kegiatan mendadak terpaksa dihandle oleh pegawai yang bisa mengemudi	Instansi	Internal	C	Karena belum adanya rekrutmen tenaga pengemudi	Mengganggu kinerja pegawai yang ditugasi untuk mengemudi sehingga tidak sesuai tupoksinya	Memfaatkan pegawai yang ada untuk menjadi pengemudi	E	Pengadaan Rekrutmen untuk Pengemudi	Surat, Media Sosial	Koordinasi dan memperluas jaringan dan informasi	Kasubag Umum dan Kepegawaian
o.1	Terjadinya penyimpangan penggunaan kegiatan perjalanan dinas	Kecamatan Wangon	Internal	C	Adanya perjalanan dinas fiktif	Terjadinya kebocoran anggaran yang tidak perlu	Pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan dari pimpinan, terkait pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas	E	Meningkatkan pembinaan terhadap pegawai akan pentingnya menjunjung nilai-nilai kejujuran dan etos kerja yang baik	Surat, Apel, Telepon, WhatsApp Group, Media Sosial	Secara periodik berkomunikasi secara langsung dengan pegawai	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
o.2	Terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan perjalanan dinas	Pelaksana	Eksternal	UC	Padatnya arus lalu lintas dan kurangnya kesadaran berlaku lintas yang aman pada pengguna kendaraan di jalan	Kerugian materiil dan non materiil	Mengingatkan kepada pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas untuk memaksa kelengkapan berkendara dan tertib dalam mengkuli peraturan berlalu-lintas	E	Meningkatkan keterampilan dan penguasaan peraturan lalu lintas	Surat, Telepon, Apel, WhatsApp Group, Media Sosial	Sering menyampaikan pentingnya safety driving	Sekretaris Kecamatan

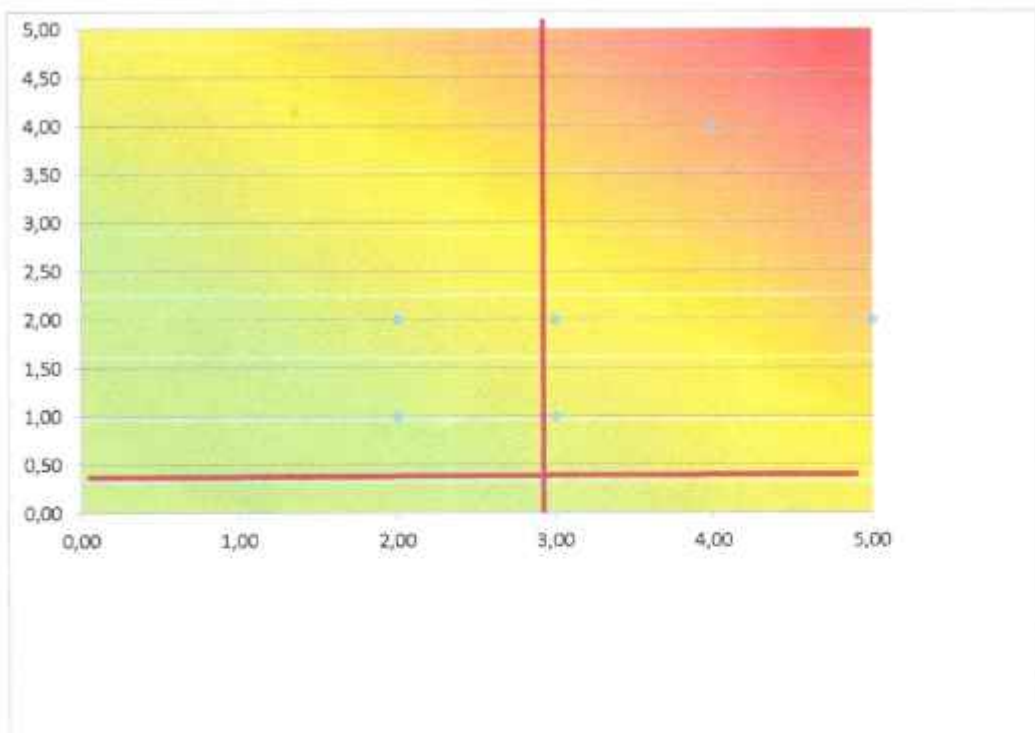
1	2	3	PENYEBAB		7	8	9	10	11	12	13	
			4 SUMBER	5 U/C								6 URAIAN
0.3	Rapat yang diikuti tidak oleh yang berkompeten menangani perihal rapat	Kecamatan Wangon	Internal	C	Padatnya kegiatan rapat sehingga harus dilaksanakan pembagian tugas	Kurang teresrap dan tersalurkannya maksud rapat	Melakukan pembagian tugas dan evaluasi secara berkelanjutan	E	Memberikan pengetahuan gambaran tupoksi kepada seluruh karyawan kecamatan agar semua karyawan dapat memahami tupoksi masing-masing sekali dengan baik	Surat, Apel, Telepon, WhatsApp Group, Media Sosial	Orientasi Lingkungan yang berkelanjutan	Sekretaris Kecamatan





### Bagan Peta Risiko Kecamatan Wangon

Peta risiko pada Kecamatan Wangon adalah sebagai berikut:



Peta risiko ini akan digunakan untuk merumuskan kebijakan mengatasi risiko lebih lanjut.

